



DOI:

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/qe/index>

Analisis Pengaruh Kebijakan BI Rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020

Dewi rahma damayanti¹⁾, Putri Aulina²⁾, Lasria Situngkir³⁾, Vera Dwifany⁴⁾

- 1) Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
 - 2) Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
 - 3) Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
 - 4) Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
-

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan indikator makro untuk menilai apakah perekonomian suatu daerah meningkat atau tidak. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses jangka panjang pertumbuhan output perkapita. Hal itu dapat kita lihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kebijakan BI Rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data menggunakan program aplikasi E-views versi 10 dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Suku bunga BI Rate secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Pada variabel BI Rate $t\text{-statistic} > t\text{ tabel} = -3.017249 > 1.73406$ (H_0 ditolak dan H_a diterima) $p\text{-value} < \alpha = 0.0078 > 0.05$ (H_0 diterima dan H_a ditolak). Pajak Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Pada variabel Pajak Daerah $t\text{-statistic} > t\text{ tabel} = 8.048469 > 1.73406$ (H_0 ditolak dan H_a diterima) $p\text{-value} < \alpha = 0.0000 > 0.05$ (H_0 diterima dan H_a ditolak).

Kata Kunci: pdrb, bi-rate dan pajak daerah.

Abstract

The economic growth of a region is a macro indicator to assess whether the economy of a region is increasing or not. Economic growth can also be interpreted as a long-term process of per capita output growth. We can see this through the GRDP (Gross Regional Domestic Product) of the region. This study aims to determine the effect of BI Rate Policy and Local Taxes on GRDP in North Sumatra Province in 2001-2020. The method used in this research is descriptive quantitative. In this study, the data used is secondary data. The data analysis technique uses the E-views version 10 application program with multiple regression analysis. The results of this study indicate that the BI Rate interest rate partially and significantly affects GRDP in North Sumatra Province. On the BI Rate variable $t\text{-statistic} > t\text{ table} = -3.017249 > 1.73406$ (H_0 rejected and H_a accepted) $p\text{-value} < \alpha = 0.0078 > 0.05$ (H_0 is accepted and H_a is rejected). Local taxes partially and significantly affect GRDP in North Sumatra Province. In the Regional Tax variable $t\text{-statistic} > t\text{ table} = 8.048469 > 1.73406$ (H_0 rejected and H_a accepted) $p\text{-value} < \alpha =$

$0.0000 > 0.05$ (H_0 accepted and H_a rejected).

Keywords: *gross domestic product, bi-rate and local tax.*

How to Cite: Pertama, N.P. Pertama, P. & Ketiga, P. (2017). Judul Hendaknya Ringkas dan Informatif Tidak Lebih dari 15 Kata dalam Bahasa Indonesia. *JURNAL EKODIK*, Vol (No): halaman.

*Corresponding author:

ISSN 2549-1660 (Print)

E-mail: Pertama @gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan indikator makro untuk menilai apakah perekonomian suatu daerah meningkat atau tidak. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses jangka panjang pertumbuhan output perkapita. Hal itu dapat kita lihat melalui PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi juga memperlihatkan apakah kegiatan perekonomian dapat menghasilkan penambahan pada pendapatan masyarakat maupun pada produksi barang dan jasa di daerah tersebut. Dengan adanya kegiatan ekonomi maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Sukirno, 2006).

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada gambar (1) dapat dilihat bahwa PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. Di tahun 2020, PDRB Provinsi Sumatera Utara mencapai 811.280 miliar rupiah. Selisih PDRB di tahun 2020 dengan PDRB di tahun 2001 adalah sebesar 732.779 milyar rupiah atau mengalami peningkatan sekitar

933% dalam 20 tahun belakangan. Begitu pula selisih PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 dengan tahun 2010 yaitu sebesar 536.224 milyar rupiah atau mengalami peningkatan sekitar 194%.

Gambar 1. Data PDRB, BI Rate dan Pajak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020"

Tahun	PDRB HB Milyar Rp	BI_Rate %	Pajak Daerah Milyar
2001	78.501,35	16,50	69,30
2002	88.117,50	15,00	123,91
2003	101.323,70	10,00	166,76
2004	118.100,70	7,50	277,03
2005	139.618,30	12,75	314,71
2006	160.376,80	9,75	318,77
2007	180.375,40	8,00	351,68
2008	195.155,20	9,25	351,68
2009	326.353,60	6,50	375,57
2010	275.056,50	6,50	446,80
2011	314.372,40	6,00	537,45
2012	417.120,20	5,75	1.043,75
2013	469.460,20	6,50	1.592,79
2014	521.920,90	7,50	1.937,26
2015	571.720,30	7,50	2.050,58
2016	628.390,80	6,00	2.290,98
2017	684.072,70	4,50	4.824
2018	741.350,00	4,50	4.824
2019	799.610,00	5,50	5.058
2020	811.280,00	4,25	6.087

Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga tidak luput dari peranan kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah kebijakan suku bunga BI Rate. Suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) ialah kebijakan suku bunga yang mencerminkan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Basundari, Palupi).

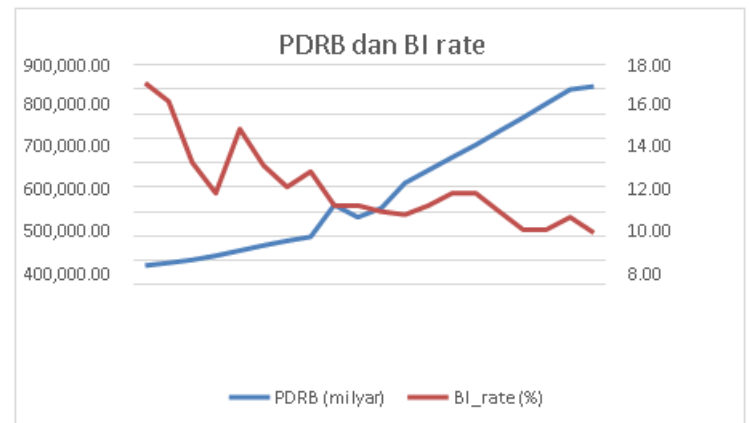
Keputusan Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat acuan suku bunga

(BI Rate) memiliki pengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara yang tercermin dalam Peningkatan PDRB di Provinsi Sumatera Utara dalam 20 tahun terakhir. Dalam gambar (2), dapat kita lihat bahwa hubungan antara BI Rate dengan PDRB Provinsi Sumatera Utara ialah berbanding terbaik, yang artinya ketika BI Rate mengalami penurunan, maka terjadi peningkatan terhadap PDRB. Berdasarkan data, pada tahun 2001, BI rate yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 16,50 % dan PDRB Provinsi Sumut sebesar 78.501 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 BI Rate yang ditetapkan sebesar 4,25 % dan PDRB sebesar

811.280 miliar rupiah. Selisih BI Rate pada tahun 2001 dengan 2020 adalah sebesar 12,25 % sedangkan selisih PDRB di tahun 2020 dengan 2001 adalah sebesar 732.779 milyar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 20 tahun belakangan, BI rate cenderung mengalami penurunan sedangkan PDRB Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan.

Gambar 2. Perkembangan PDRB dan Bi Rate di Sumatera Utara tahun 2001-

2020



Selain itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi juga tidak luput dari peranan kebijakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa oleh negara kepada para penduduknya dan didasarkan pada undang-undang perpajakan, serta bagi pembayarannya tidak diberikan kontrapresepisi secara langsung (Indrawati dan Daryono Soebagyo,2006). Pendapatan negara dari pajak dapat digunakan untuk membangun suatu negara. Pembangunan-pembangunan fasilitas publik yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, dinilai sebagai suatu investasi untuk memudahkan kegiatan ekonomi kedepannya yang mana dapat meningkatkan perekonomian nasional.

Pajak di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2001 hingga saat ini. Akan tetapi peningkatan pajak juga dibarengi dengan peningkatan PDRB Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti pajak dan PDRB Sumatera Utara memiliki hubungan yang positif, yaitu ketika pajak mengalami peningkatan maka PDRB Sumatera Utara mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada gambar (3) berikut ini.

Gambar 3. Perkembangan Pajak Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2001-2020



Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah digambarkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara BI Rate dan Pajak terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Namun selain itu, peneliti juga tertarik untuk menganalisis apa pengaruh kedua variabel independen tersebut (BI Rate dan Pajak) terhadap variabel dependen PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan melakukan sebuah penelitian dengan

judul “Analisis Pengaruh BI Rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020”.

LANDASAN TEORI

Kajian Pustaka

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses jangka panjang pertumbuhan output perkapita yang tercermin dari PDRB suatu daerah. Pertumbuhan output tidak luput dari peranan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah seperti kebijakan suku bunga BI Rate dan kebijakan Pajak.

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh perekonomian suatu daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk lain yang bertempat tinggal pada daerah tersebut). Perhitungan PDRB sangat dibutuhkan untuk menganalisis perencanaan pembangunan dan untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan serta untuk melihat seberapa besar output yang dihasilkan suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah regional atau provinsi dalam kurun waktusatu tahun tertentu. PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dan dihitung berdasarkan tahun dasar. Secara umum pertumbuhan ekonomi didefenisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (quntitative change) dan biasanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang akhir dan jasa (final goods and service) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun. Untuk Menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi

yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto sebagai bahan dasar pembuatan coklat dan bahan makanan lainnya. Biasanya kakao yang diekspor berupa kakao bubuk yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia.

Pengertian PDRB dapat dilihat dari tiga sudut pandang yang berbeda namun mempunyai pengertian yang sama, yaitu:

- a. Menurut cara produksi, PDRB merupakan jumlah nilai produksi netto dari barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu sembilan kelompok lapangan usaha, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restaurant, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa.
- b. Menurut cara pendapatan,

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi adalah upah, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung lainnya. Dalam pengertian PDRB, kecuali balas jasa faktor produksi diatas termasuk pula komponen penyusutan dan pajak tak langsung netto. Seluruh komponen pendapatan ini secara sektoral disebut Nilai Tambah Netto.

- c. Menurut cara pengeluaran, PDRB adalah komponen permintaan aktif seperti : pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari utang, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestic bruto, perubahan stok, ekspor netto.

Dari ketiga pendekatan tersebut, secara konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah komponen nilai tambah

bruto termasuk didalamnya balas jasa faktor produksi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usaha.

BI Rate

Menurut Raharjo dan Elida (2015:43), BI rate adalah suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang mencerminkan sikap kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat agar dapat menjadikan acuan oleh masyarakat dalam mengambil langkah-langkah pada bidang ekonomi. Secara operasional, penetapan suku bunga BI Rate

diharapkan dapat mempengaruhi suku bunga deposito, suku bunga perbankan serta suku bunga pasar uang. Kebijakan untuk menurunkan suku bunga BI rate dilakukan agar mendorong perekonomian nasional dari dampak melemahnya inflasi. Suku bunga BI rate yang turun, kemudiakan akan menurunkan suku bunga kredit yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan kredit dari rumah tangga dan perusahaan serta akan menurunkan biaya modal investasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi dan investasi yang pada akhirnya akan membuat perekonomian bergairah dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwiet Aji Prihatin, Arintoko dan Suharno (2019) dengan judul penelitian "Analisis Pengaruh Variabel- Variabel Moneter terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" yaitu suku bunga BI Rate memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin rendah pertumbuhan suku bunga akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pajak

Menurut (Mangkoesoebroto, 1998), Pajak merupakan pungutan yang didasarkan pada undang-undang, dan dapat dipaksakan kepada subyek yang mana balas jasanya tidak secara langsung tetapi melalui penunjukkan penggunaan. Sedangkan Mardiasmo (2016:3) berpendapat bahwa pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara oleh para penduduknya yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kas negara dan pada akhirnya diperuntukkan untuk pelaksanaan undang-undang seperti membangun fasilitas umum atau membayar kepentingan umum atau pelaksanaannya tidak balas jasa secara langsung akan tetapi lebih kepada publik. Hal ini bermaksud bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran untuk membantu pembangunan negara yang akan dialokasikan pemerintah kepada fasilitas-fasilitas publik yang akan menunjang peningkatan kegiatan perekonomian. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Aprilia Damaningrum (2015) dengan judul "Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah

Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surakarta” bahwa Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dengan tingkat koefisien 0.468501.

Pajak Daerah Menurut Rahardjo Adismita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah, (2014:100).“Pajak daerah dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah.
3. Pajak daerah ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi hasil dengan, atau dibebani pungutan tambahan (Opsen) oleh Pemerintah Daerah”.

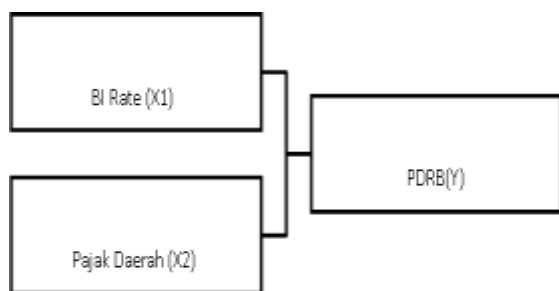
Dalam Perda Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Bab 1 Pasal 1 ayat 7 menjelaskan :“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah BI rate dan Pajak Daerah. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah PDRB. Dengan demikian dalam penelitian ini akan meneliti bagaimana BI rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:



Hubungan BI Rate Dengan PDRB

Kebijakan untuk menurunkan suku bunga BI rate dilakukan agar mendorong perekonomian nasional dari dampak melemahnya inflasi. Suku bunga BI rate yang turun, kemudiakan akan menurunkan suku bunga kredit yang pada akhirnya akan meningkatkan permintaan kredit dari rumah tangga dan perusahaan serta akan menurunkan biaya modal investasi perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi dan investasi yang pada akhirnya akan membuat perekonomian bergairah dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015).

Hubungan Pajak Daerah Dengan PDRB

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB ini akan menjelaskan sejauh mana kemampuan daerah dalam

mengelola atau memanfaatkan sumberdaya yang ada. Menurut Marliyanti dan Arka (2014) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara langsung terhadap Pajak. Nurcholis (2005) yang mengatakan jika PDRB meningkat maka kemampuan dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat. Sehingga akan meningkatkan pajak.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis simultan bertujuan untuk menduga pengaruh seluruh variable bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variable terikat. Hipotesis Simultan (H3) dalam penelitian ini adalah diduga BI RATE (X1), PAJAK DAERAH (X2) berpengaruh terhadap PDRB (Y) di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2020.

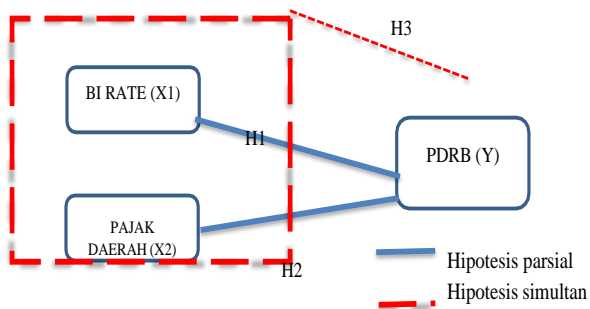
Hipotesis Parsial bertujuan untuk menduga pengaruh variable bebas secara individual (parsial) terhadap variable terikat.

Hipotesis parsial dalam penelitian ini adalah:

- a. H1 = Diduga BI RATE (X1) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB/Y) Provinsi Sumatera

Utara tahun 2001-2020.

- b. H2 = Diduga PAJAK DAERAH (X2) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB/Y) Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2020.



METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan beberapa variabel yang mempengaruhi PDRB di Sumatera Utara. Dan Waktu penelitian dilakukan pada 05 - 08 September 2022

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan

dan hasilnya (Arikunto, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara meliputi PDRB, BI Rate, dan Pajak di Provinsi Sumatera Utara dengan rentang waktu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020.

Teknik Penumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diambil melalui perantara atau pihak yang telah mengumpulkan data tersebut sebelumnya, dengan kata lain peneliti tidak langsung mengambil data sendiri ke lapangan. Didalam penelitian ini data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara untuk mengetahui data BI Rate, Pajak Daerah dan PDRB tahun 2001-2020. Sedangkan untuk data pendukung penelitian ini diambil dari jurnal-jurnal yang berhubungan.

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data menggunakan program aplikasi E-views versi 10 dengan analisis regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear

berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Analisis linear berganda adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan antar variabel dependen dan variabel independent. Disebut model regresi linear berganda karena memiliki lebih dari satu variabel bebas dalam model. Alat analisis data menggunakan program E-views versi 10 dengan model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_t$$

Keterangan:

Y = PDRB (milyar rupiah)

α = konstanta persamaan regresi

β_1, β_2 = koefisien variabel independen

X1 = BI Rate (%)

X2 = Pajak Daerah (milyar rupiah)

e = eror term

t = data time series

Nilai koefisien dalam penelitian ini menentukan dasar analisis. Apabila koefisien β bernilai positif maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah antara

variabel independen dengan variabel dependen yaitu setiap terjadi kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen, begitu pula sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

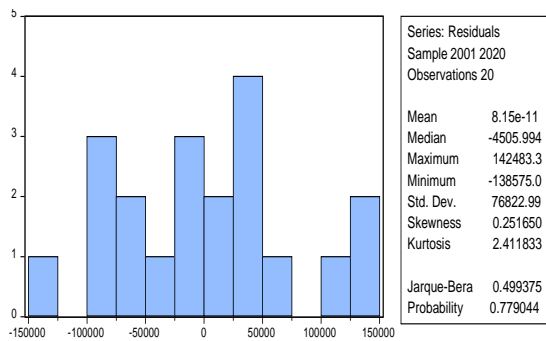
Merupakan prasyarat analisis regresi berganda. Pengujian ini harus dipenuhi agar penaksiran parameter dan koefisien regresi tidak bias. Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi antara lain: uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji Normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen terdistribusikan secara normal atau tidak (Ghozali, 2017).

Interpretasi dari hasil olahdata uji normalitas yaitu dengan kriteria pengambilan keputusan: Jika nilai probability > 0.05, artinya residual distribusi model normal. Jika nilai probability < 0.05, artinya residual distribusi tidak normal.

Gambar 4. Hasil olah data uji normalitas



Dari hasil olah data diatas diperoleh nilai probability sebesar $0.779044 > 0.05$ maka data terdistribusi normal dan asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan uji normalitas dalam model penelitian BI Rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk untuk memastikan apakah di dalam model regresi penelitian ini terdapat interkorelasi atau korelasi kuat antar variabel bebas di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance-nya. Interpretasi dari hasil olahdata uji multikolinearitas dengan nilai VIP dengan kriteria pengambilan keputusan:

Nilai VIF > 10 , maka terjadi masalah uji multikolinieritas.

Nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi permasalahan.

Gambar 5. Hasil olah data uji multiikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.30E+09	16.06095	NA
BI_RATE	49452916	11.19956	1.632982
PAJAK	148.3170	2.860432	1.632982

Dari hasil olah data diatas, dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) masing-masing variabel lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi permasalahan uji multikolinearitas yaitu Nilai VIF BI Rate sebesar 1.632982, Nilai VIF Pajak Daerah sebesar 1.632982. Sehingga dapat disimpulkan terdapat korelasi kuat antar variabel bebas di dalam model penelitian BI Rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun2001-2020.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear berganda ada korelasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi kuat antarperiode waktu data dapat mengakibatkan terjadi permasalahan autokorelasi, yang berarti

kondisi sekarang dipengaruhi oleh keadaan data atau kondisi tahun sebelumnya. Cara mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan uji statistic Breusch-Godfrey LM Test yaitu probability chi squared Obs*R-squared dengan kriteria penentuan:

Nilai Probability chi squared Obs*R-squared > 0.05, maka tidak terjadi permasalahan Nilai Probability chi squared Obs*R-squared < 0.05, maka terjadi permasalahan.

Gambar 6. Hasil olah data uji autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.246914	Prob. F(2,15)	0.1401
Obs*R-squared	4.610514	Prob. Chi-Square(2)	0.0997

Dari hasil olah data diatas, diperoleh Nilai Probability chi squared Obs* R-squared sebesar 0.0997 > 0.05, maka tidak terjadi permasalahan autokorelasi dalam model penelitian BI Rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas.

Interpretasi hasil olahdata uji heteroskedastisitas dengan Breusch-Godfrey LM Test. Dengan kriteria penentuan Nilai Probability chi squared Obs*R-squared > 0.05, maka tidak terjadi permasalahan Nilai Probability chi squared Obs*R-squared < 0.05, maka terjadi permasalahan

Gambar 7. Hasil olah data uji heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.778858	Prob. F(2,17)	0.4746
Obs*R-squared	1.678779	Prob. Chi-Square(2)	0.4320
Scaled explained SS	1.349122	Prob. Chi-Square(2)	0.5094

Dari hasil olah data diatas, diperoleh Nilai Probability chi squared Obs*R-squared sebesar 0.4320 > 0.05, maka tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas dalam model penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan uji heteroskedastisitas dalam model penelitian BI Rate dan Pajak Daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2020.

Uji Hipotesis

Dilakukan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependent) dengan menggunakan level of significance sebesar 5%. Uji hipotesis meliputi uji simultan (uji secara bersama-sama) dan uji parsial (masing-masing variabel).

Uji Simultan

Uji Simultan, digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas (independent) berpengaruh terhadap variabel terikat (dependent) dengan menggunakan level of significance sebesar 5%.

Gambar 8. Hasil olah data uji simultan

R-squared	0.909104	Mean dependent var	381113.8
Adjusted R-squared	0.898410	S.D. dependent var	254810.9
S.E. of regression	81216.36	Akaike info criterion	25.58510
Sum squared resid	1.12E+11	Schwarz criterion	25.73446
Log likelihood	-252.8510	Hannan-Quinn criter.	25.61426
F-statistic	85.01312	Durbin-Watson stat	1.049146
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil olah data didapatkan f tabel sebesar 3.59 maka didapatkan hasil: $F\text{-statistic} > F\text{ tabel} = 85.01312 > 3.59$ (maka H_0 ditolak dan H_a diterima), sementara itu $p\text{-value} < \alpha = 0.000000 < 0.05$ (maka H_0 ditolak dan H_a diterima). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel BI Rate dan Pajak Daerah secara simultan (bersama-sama) berpengaruh

terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2020.

4.2.1 Uji Parsial

Uji Parsial, digunakan untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel bebas (independent) berpengaruh terhadap variabel terikat (independent) secara parsial, dengan melihat nilai t-hitung dibandingkan dengan nilai t-tabel atau dengan cara lainnya dengan melihat nilai probabilitasnya atau p.value. Jika menggunakan t-statistic maka harus membandingkan dengan t-tabel. Pengambilan keputusan t-statistic adalah sebagai berikut:

Jika $t\text{ hitung} < t\text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $t\text{ hitung} > t\text{ tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika menggunakan p-value ($\text{prob}(F\text{-statistic})$) maka pengambilan keputusan p-value sebagai berikut:

Jika $p\text{-value} > \alpha (0.05)$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Jika $p\text{-value} < \alpha (0.05)$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Gambar 9. Hasil olah data uji parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	388657.6	72780.36	5.340143	0.0001
BI_RATE	-21218.13	7032.277	-3.017249	0.0078
PAJAK	98.01864	12.17854	8.048469	0.0000

Berdasarkan hasil olahdata didapatkan t tabel sebesar 1.73406 maka

didapatkan hasil:

- Pada variabel BI Rate t-statistic > t tabel = -3.017249 > 1.73406 (H0 ditolak dan Ha diterima) p-value < α = 0.0078 > 0.05 (H0 diterima dan Ha ditolak). Artinya: Suku bunga BI Rate secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.
- Pada variabel Pajak Daerah t-statistic > t tabel = 8.048469 > 1.73406 (H0 ditolak dan Ha diterima) p-value < α = 0.0000 > 0.05 (H0 diterima dan Ha ditolak). Artinya: Pajak Daerah secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

Maka dapat disimpulkan bahwa variabel BI Rate dan Pajak Daerah

masing-masing berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2020.

Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi merupakan uji untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari R-squared (R^2). Dari hasil olah data (Gambar 8), dapat dilihat bahwa hasil uji nilai koefisien determinasi R-squared (R^2) sebesar 0.909104, yang artinya variasi seluruh variabel bebas (BI Rate dan Pajak Daerah) terhadap variabel terikat (PDRB) sebesar 90.91% dan sisanya sebesar 9.09% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Persamaan Regresi Yang Terbentuk

Dari hasil olah data (Gambar 9), maka didapat model persamaan yang terbentuk sebagai berikut:

$$\text{PDRB} = 388657.6 - 21218.13 (\text{BI Rate}) + 98.01864 (\text{Pajak}) + e$$

Interpretasi:

- α = 388657.6 artinya apabila BI Rate dan Pajak Daerah

bernilai 0 (nol), maka PDRB Sumatera Utara bernilai positif 3888657.6

- Nilai koefisien BI Rate (X1) sebesar 21218.13 dan bertanda negatif, yang artinya setiap peningkatan BI Rate sebesar 1 satuan akan menurunkan PDRB sebesar 21218,13.

Nilai koefisien Pajak Daerah (X2) sebesar 98.01864 dan bertanda positif, yang artinya setiap peningkatan Pajak Daerah sebesar 1 satuan akan menaikkan PDRB sebesar 98.01.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil & pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan BI Rate berpengaruh negative (berbanding terbalik) dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap terjadinya kebijakan penurunan suku bunga BI rate, maka akan terjadi peningkatan PDRB di Provinsi Sumatera Utara. Begitupula sebaliknya, ketika terjadi peningkatan suku bunga BI Rate, maka akan terjadi penurunan PDRB di provinsi Sumatera Utara, Pajak Daerah atau Kebijakan pemungutan pajak daerah memiliki pengaruh yang positif (searah) dan signifikan terhadap PDRB di

Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dimaksudkan bahwa ketika terjadi peningkatan pemungutan pajak daerah, maka akan terjadi peningkatan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Damaningrum, A. (2015, Maret). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Jumlah Penduduk, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Surakarta*. Retrieved from UMSLibrary.

Informatika, B. S. (n.d.). *Landasan Teori*. Retrieved from Repository Bina Sarana Informatika: https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/271146/File_10-BAB-II-Landasan-Teori.pdf

Iqbal Muhammad dkk, *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Daerah Kabupateb Bandung*. (2018). Akurat. Vol-9 no-1

Izzah, N. (2012). *ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL TERHADAP STABILITAS HARGA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH*

(PERIODE 2001-2010).

Economic development analysis
journal, 42-50.

Sekretariat Jenderal DPR RI. (2015).

DAMPAK PENURUNAN BI RATE
TERHADAP PEREKONOMIAN
NASIONAL. Ekonomi dan Kebijakan
Publik, 13-16.

Wiwiet Aji Prihatin, A. S. (2019).

ANALISIS PENGARUH
VARIABEL-VARIABEL
MONETER TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI
INDONESIA. Jurnal
Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi
(JEBA), 1-12.